



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL  
**SUB UNIT KERJA** : BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : EDDY PURWANTO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN FASILITAS PERSIDANGAN
3. NHK : 124438

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 450.000.000

1. Tanah Seluas 1260 m2 di TULUNGAGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 220.000.000

1. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
2. MOTOR, YAMAHA FINO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
4. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIO SEDAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 48.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 30.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 748.000.000**III. HUTANG** Rp. 233.500.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 514.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **10 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.